

Judul : Pemerintah Komitmen Sejahterakan Hakim
Tanggal : Rabu, 09 Oktober 2024
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Pemerintah Komitmen Sejahterakan Hakim

Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki komitmen yang sama untuk memperbaiki kesejahteraan hakim. Saat ini, pemerintah tengah menghitung kenaikan gaji dan tunjangan hakim.

JAKARTA, KOMPAS — Perjuangan ribuan hakim menuntut peningkatan gaji dan tunjangan yang sudah 12 tahun tidak naik mulai membuahkan hasil. Pemerintah telah menegaskan komitmen untuk memperbaiki kesejahteraan hakim. Sebab, pemerintah meyakini kemandirian serta kesejahteraan hakim merupakan kunci penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi.

Komitmen untuk memperbaiki kesejahteraan hakim tak hanya disampaikan Presiden Joko Widodo, tetapi juga presiden terpilih Prabowo Subianto, di lokasi terpisah, Selasa (8/10/2024).

Presiden Jokowi menyampaikan bahwa kenaikan gaji dan tunjangan hakim masih dibitung dan dikalkulasi oleh Kementerian terkait. "Semuanya masih dalam kajian dan penghitungan di Menpan, Menkumham, dan Kemenkeu. Semuanya baru dihitung dan dikalkulasi," ujar Presiden seusai membuka BNI Investor Daily Summit, di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, ribuan hakim yang bertugas di sejumlah daerah di Indonesia memulai cuti bersama pada Senin (7/10). Gerakan cuti bersama yang akan digelar selama lima hari itu merupakan bentuk protes atas tidak adanya kenaikan gaji dan tunjangan selama 12 tahun terakhir.

Pada hari pertama tersebut, sejumlah perwakilan hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) menggelar audiensi dengan sejumlah pihak. Selain Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), perwakilan SHI juga menemui Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas.

Pada hari kedua, Selasa kemarin, SHI bertemu dengan

pimpinan DPR. Selanjutnya, kelompok hakim ini juga berencana bertemu dengan pihak Kemenkeu, KY, dan Bappenas.

Dalam pertemuan dengan DPR, para hakim diterima oleh empat Wakil Ketua DPR di ruang rapat Komisi III di Gedung Nusantara II. Mereka adalah Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, Cucun Syamsurizal, dan Saan Mustopa.

Sama dengan pertemuan bersama lembaga-lembaga lain, dalam audiensi dengan DPR itu, para hakim menyampaikan tuntutan kenaikan gaji dan tunjangan. Sebab, selama 12 tahun belum ada kenaikan gaji ataupun tunjangan hakim.

Di tengah pertemuan, Dasco tiba-tiba menelepon presiden terpilih Prabowo Subianto. Melalui panggilan telepon itu, Prabowo menyampaikan bahwa ia diberi tahu oleh Dasco terkait pertemuan para hakim dengan pimpinan DPR.

Perbaiki kualitas hidup

Prabowo pun menyampaikan bahwa sudah sejak lama ia menaruh perhatian terhadap para hakim. "Saya berpendapat bahwa yudikatif kita harus sangat kuat. Karena itu, dari dulu pendapat saya, Saudara bisa cek di semua pidato saya, di berbagai tulisan saya. Saudara juga bisa pelajari dari rekam jejak ucapan-ucapan saya. Bahwa saya sangat berpendapat para hakim harus diperbaiki kualitas hidupnya dan harus dijamin supaya para hakim mandiri," tuturnya.

Dengan memastikan kualitas hidup hakim, lanjutnya, hakim baru bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Ketua Umum Partai Gerindra itu lantas mengungkapkan keinginannya untuk memperbaiki remunerasi dan penghasilan para hakim supaya lebih baik.

Ucapan itu pun disambut tepuk tangan para hakim. Mereka bahkan bangkit dari tempat duduknya sembari bertepuk ta-

ngan sebagai bentuk apresiasi.

Prabowo menjelaskan, apa yang ia sampaikan kepada para hakim bukanlah janji karena masa kampanye sudah selesai. Ia meminta para hakim sabar menunggu sebentar sampai ia resmi menerima estafet dan mandat jabatan pada 20 Oktober mendatang.

"Saya benar-benar akan memperhatikan para hakim. Karena supaya negara kita bisa menghilangkan korupsi, para hakim tidak boleh disogok, tidak boleh dibeli. Para hakim harus terhormat dan para hakim harus mendapatkan perhatian dari negara," ujarnya.

Perhatian negara yang dimaksud adalah penghasilan yang memadai agar hakim memiliki harga diri yang sangat tinggi dan tidak perlu mencari tambahan penghasilan di luar. Prabowo pun ingin semua pihak bersatu untuk membenahi negara. Oleh sebab itu, pendapatan negara juga harus digenot dengan mengajarkan kewajiban pajak dari pengusaha-pengusaha besar dengan sebaik-baiknya.

"Semua harus bahu-membahu. Yang kuat bantu yang lemah. Yang lemah kita harus bersatu, jadi negara kita sama-sama akan bangkit, sama-sama akan makmur," tuturnya.

Salah satu koordinator SHI, Rangga Desnata Lukita, mengapresiasi komitmen Prabowo Subianto selaku presiden terpilih. SHI akan terus mengawal agar tuntutan mereka, yaitu kenaikan gaji dan tunjangan sebesar 142 persen dari Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012, terpenuhi.

"Kami akan mengawal sampai janji Pak Prabowo benar-benar direalisasikan dan sesuai dengan tuntutan kami. Jadi, perjuangan belum selesai," kata Rangga.

Salah seorang juru bicara SHI, Camila Banja Lumbia, mengatakan, gerakan cuti bersama

hakim murni didasari pada keresahan dalam mempertahankan integritas, tetapi sudah tak sanggup lagi dengan gaji seperti yang ada saat ini. Padahal, biaya hidup di daerah sudah sangat mahal.

Gaji ideal

Gerakan cuti bersama para hakim karena menuntut kenaikan gaji dan tunjangan membuat sejumlah pihak prihatin, salah satunya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie. Menurut dia, para hakim yang berada di ranah yudikatif semestinya menerima gaji dan tunjangan dengan nilai di atas standar penghasilan para pejabat eksekutif dan legislatif.

"Kalau menurut saya, standar gaji dan tunjangan hakim sebaiknya di atas pejabat eksekutif dan legislatif. Harus di atasnya. Jadi, kalau pengadilan di tingkat kabupaten, harus dilihat berapa penghasilan anggota DPRD kabupaten itu. Dia harus lebih tinggi. Dan, juga harus lebih tinggi dari bupati," tuturnya.

Hal itu karena hakim tak bisa bergaul sebebaskan pejabat eksekutif dan legislatif. Para hakim sebaiknya hanya bergaul dengan lingkungan internal atau kalangan perguruan tinggi.

"Supaya apa? (Supaya) dia akrab dengan dunia intelektual. Itu lingkungan pergaulannya. Bergaul dengan *businessman*, enggak boleh. Main golf dengan pengusaha, enggak boleh. Main golf dengan politisi, tidak boleh. Sebab, dunia hakim itu harus berdiri sendiri. Maka, penghasilannya harus dipastikan lebih tinggi," kata Jimly.

Menurut dia, hakim merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang juga cabang ketiga kekuasaan negara. Dengan demikian, kedudukan ketua pengadilan di tingkat provinsi, kabupaten, kota adalah sama tingginya dengan bupati atau ketua DPRD. (ANA/DEA/DNA/BYT/SYA)